

**PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG
(663211)**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2026

**Jalan Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)
Jakabaring Palembang
Email : palembang@dilmil.org
Telpon : (0711)-5620579
Fax : (0711)-5620579**



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 001.05

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang

Telp. (0711)-5620579 Fax. (0711)-5620579

E-mail : palembang@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Pernyataan Tanggung Jawab	7
Ringkasan	9
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. DASAR HUKUM	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	27
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	36
Selama periode berjalan, Pengadilan Militer I-05 Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ssituasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendaapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja.....	37
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
C.1. Aset Lancar.....	41
C.2. Aset Tetap	43
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	48

C.6.	Beban yang Masih Harus Dibayar	49
C.7.	Ekuitas	49
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	50
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	50
D.2.	Beban Pegawai	50
D.3.	Beban Persediaan	50
D.4.	Beban Barang dan Jasa	51
D.5.	Beban Pemeliharaan	52
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	52
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	53
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	53
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	54
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	55
D.11.	Beban Lain-lain.....	55
D.12.	Kegiatan Non Operasional	56
D.13.	Pos Luar Biasa	56
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	57
E.1.	Ekuitas Awal	57
E.2.	Surplus (defisit) LO	57
E.3.	Penyesuaian Nilai Aset.....	57
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	57
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	58
	Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2025 dan 2026 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG oleh KPKNL Palembang.	58
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	58
E.4. 5	Koreksi Lain-lain	58
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	59
E.6.	Ekuitas Akhir.....	59
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	60
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	60

F.2. Pengungkapan Lain-lain	60
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	61
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	61

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan MILITER I-05 PALEMBANG

Jalan Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang

Telp. (0711)-5620579 Fax. (0711)-5620579 E-mail : palembang@dilmil.org

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-05 Palembang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-05 Palembang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Militer I-05 Palembang. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER I-05' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Supriyadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21950303390275

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 232/PMK.05/2026 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2026 s.d 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 6.071.754 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA. 2026 adalah sebesar Rp. 7.982.589.432,- atau mencapai 55 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 14.553.257.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2026.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 14.333.180.160,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 19.984.500,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar

Rp. 14.313.331.660,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 775.003.658 dan Rp. 13.558.176.502,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 7.794.676.450,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (7.775.342.482,-) Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp. 1.868.786,- dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp. (7.773.473.696,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 13.355.132.520,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar Rp. (7.773.473.696,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 7.976.517.678,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp. 13.558.176.502,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2026, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 2025 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	SEMESTER I TA 2026			TA 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	6.071.754	0	117
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	6.071.754	0	117
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	13.022.367.000	7.276.492.549	56	2.085.394.625
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.499.890.000	696.122.883	46	839.535.313
3.	Belanja Modal	B.2.3.	31.000.000	9.974.000	32	0
	Jumlah Belanja Negara		14.553.257.000	7.982.589.432	55	2.924.929.938

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

NERACA

Per 30 Juni 2026 DAN 2025

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	2025
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	19.200.000	24.000.000
Persediaan	C.1. 2.	648.500	335.310
Jumlah Aset Lancar		19.848.500	24.335.310
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	10.466.081.000	10.466.081.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3.904.245.984	3.817.524.274
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	4.650.227.000	4.650.227.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4	190.000	190.000
Akumulasi Penyusutan	C.2. 5.	(4.707.412.324)	(4.295.462.781)
Jumlah Aset Tetap		14.313.331.660	14.656.519.493
Aset Lainnya	C.3.		
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	0	75.302.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	0	(75.302.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		14.333.180.160	14.656.650.393
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	747.931.609	11.523.226
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 2	7.872.049	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5. 3	0	9.565.833

Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	19.200.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		75.003.658	21.089.059
Jumlah Kewajiban		775.003.658	21.089.059
EKUITAS			
Ekuitas		13.558.176.502	14.635.561.334
Jumlah Ekuitas		13.558.176.502	14.635.561.334
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.333.180.160	14.635.561.334

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

LAPORAN OPERASIONAL Per 30 Juni 2026 DAN 2025

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	19.333.968	9.565.833
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		19.333.968	9.565.833
Jumlah Pendapatan		19.333.968	9.565.833
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	6.967.161.158	2.328.335.559
Beban Persediaan	D. 3	16.814.851	15.138.238
Beban Barang dan Jasa	D. 4	424.655.270	645.185.099
Beban Pemeliharaan	D. 5	237.532.154	227.839.603
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	10.644.500	8.887.224
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	137.868.517	135.710.1543
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		7.794.676.450	3.361.095.878
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(7.775.342.482)	(3.351.530.043)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.868.786	117
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D 12	1.868.786	117

Beban dari Kegiatan non operasional lainnya	D. 13	0	0
---	-------	---	---

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1.868.786	117
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(7.773.473.696)	(3.351.529.926)
Pos Luar Biasa	D. 14	0	0
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(7.773.473.696)	(3.351.529.926)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 30 Juni 2026 DAN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	E. 1	13.355.132.520	14.635.561.334
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(7.773.473.696)	(3.351.529.926)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	7.976.517.678	2.924.929.821
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	203.043.982	(426.600.105)
Ekuitas Akhir	E. 6	13.558.176.502	14.208.961.229

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Visi Pengadilan Militer I-05 Palembang yaitu:

" Terwujudnya Pengadilan Militer I-05 Palembang Yang Agung "

Misi Pengadilan Militer I-05 Palembang adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer I-05 Palembang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur Pengadilan Militer I-05 Palembang,
hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
 - Meningkatkan kualitas putusan hakim
 - Mempercepat penyelesaian perkara
 - Menguasai Standar Operation Procedure (SOP) sesuai bidang masing-masing
 - Pengawasan yang berkualitas
 - Menerapkan reward dan punishment untuk mengontrol kinerja
 - Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
2. Meningkatkan kualitas publik, hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
 - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
 - Meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi informasi untuk pelayanan Publik
 - Mengembangkan sistem informasi perkara

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Militer I-05 Palembang adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

c. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, dipelakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan dan jembatan dan bangunan air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan aset ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/ KM.6/ 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	5
Franchise	10
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	20
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	25
	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku	70

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

○ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

○ Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Militer I-05 Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	6.071
Jumlah Pendapatan	0	117
BELANJA		
Belanja Pegawai	4.026.124.000	13.022.367.000
Belanja Barang	1.544.477.000	1.499.890.000
Belanja Modal	31.000.000	31.000.000
Jumlah Belanja	5.603.701.000	14.553.257.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp
6.071.754*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 6.071.754 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Militer I-05 Palembang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2026 ini merupakan yang merupakan potongan lainnya gaji pegawai tahun yang lalu.

Perbandingan realisasi PNBPA TA. 2026 dan 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPA per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2026	2025	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.071.754	0	0	0
	Total Pendapatan	6.071.754	0	0	0

B.2. Belanja

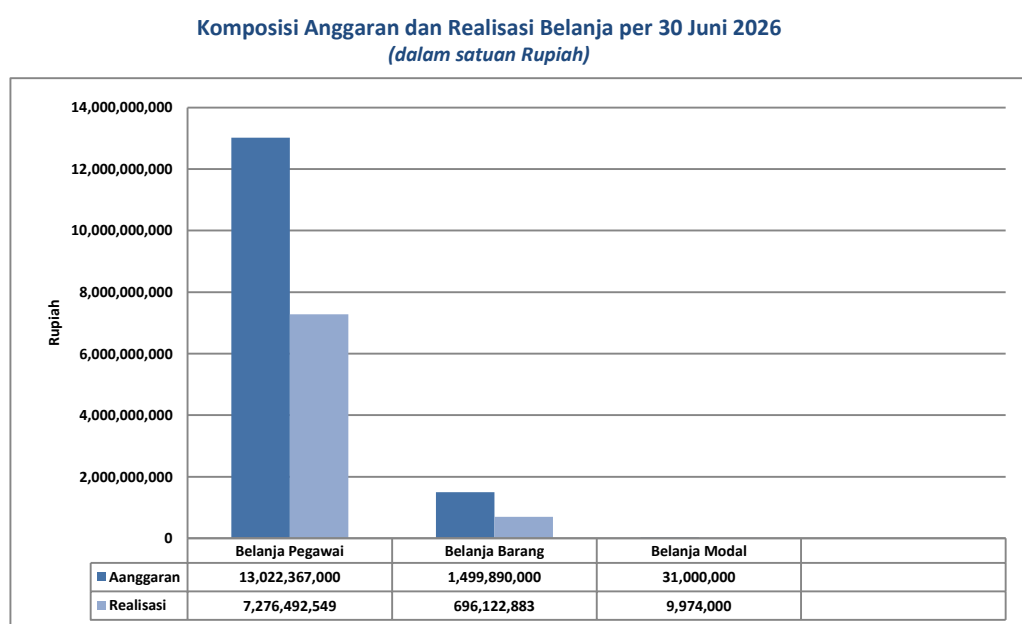
*Realisasi
Belanja Negara
: Rp.
7.982.589.432*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Militer I-05 Palembang per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 7.982.589.432 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 55 persen dari anggaran senilai Rp. 14.553.257.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA. 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	13.022.367.000	7.276.492.549	56
Belanja Barang	1.499.890.000	696.122.883	46
Belanja Modal	31.000.000	9.974.000	32
Total Belanja Bruto	14.553.257.000	7.982.589.432	55
Pengembalian Belanja			
Total Belanja Netto	14.553.257.000	7.982.589.432	55

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Aplikasi SAKTI 2026

Realisasi Belanja Negara mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 5.057.659.494,- atau sebesar 172,92 persen dari realisasi tahun lalu namun persentase realisasinya masih tetap pada pencapaian 55 persen total realisasi belanja Negara.

Perbandingan realisasi belanja TA 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	7.276.492.549	2.085.394.625	5.191.097.924	248,93
Belanja Barang	696.122.883	839.535.313	126.356.540	(17,08)
Belanja Modal	9.974.000	0	0	100
Total Belanja	7.982.589.432	2.924.929.938	5.057.659.494	172,92

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
7.276.492.549*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Militer I-05 Palembang per 31 Desember TA 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp. 7.276.492.549 dan Rp. 2.085.395.625.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11.715.000	489.774.355	(412.363.509)	(84,19)
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	35.840.000	1.595.620.270	706.061.689	44,25
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	6.402.998.000	0		
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	333.408.536	0		
Total Belanja Brutto	7.276.492.662	2.085.394.625	293.698.180	14,08
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	7.276.492.662	2.085.394.625	293.698.180	14,08

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang :
Rp. 696.122.883*

Realisasi Belanja Barang PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG per 30 Juni TA. 2026 dan TA. 2025 adalah sebesar Rp. 696.122.883 dan Rp. 839.535.313 . Realisasi Belanja Barang TA. 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 143.412.430 atau 17,08 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA. 2025.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja barang pengiriman surat dinas pos pusat	977.200	1.305.000	(1.305.000)	(25,12)
Belanja Sewa	53.650.000	55.440.000	(1.790.000)	(3,23)
Belanja barang persediaan barang konsumsi	17.679.231	12.848.998	4.830.233	37,59
Belanja perjalanan dinas dalam kota	0	300.000	(300.000)	(100)
Belanja perjalanan biasa	10.644.500	8.587.224	2.057.276	23,96
Belanja Keperluan Perkantoran	287.891.076	509.196.996	(221.305.920)	(43,46)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	19.050.000	22.120.000	(3.070.000)	(13,88)

Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Lainnya				
Belanja Langganan Listrik	68.255.450	0	(68.255.450)	1000
Belanja Langganan Telepon	3.003.696	2.977.414	26.282	0,88
Belanja Langganan Air	3.322.336	9.194.466	5.872.130	63,87
Belanja Pemeliharaan Halaman, Gedung dan Bangunan	158.618.936	163.873.545	(5.254.609)	(3,21)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71.290.458	52.722.557	18.567.901	35,22
Biaya Belanja Dinas Sidang Keliling	0	0	0	0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.440.000	0	1.440.000	100
Belanja Bahan	300.000	0	300.000	100
Belanja Pengadaan Inventaris CPNS	0	0	0	0
Belanja Alat Bantu Jalan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	696.122.883	839.535.313	(143.412.430)	(17,08)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	696.122.883	839.535.313	(143.412.430)	(17,08)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal :
Rp.9.974.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer I-05 Palembang per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp. 9.974.000 dan Rp. 0

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.974.000	0	9.974.000	100
Pengadaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Jalur Disabilitas)	0	0	0	0
Renovasi Gedung/Kantor	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	9.974.000	0	9.974.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	9.974.000	0	9.974.000	100

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:
Rp. 19.848.500*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.848.500 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Militer I-05 Palembang per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025 (dalam satuan Rupiah)		
Uraian	30 Juni 2026	TA 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran	19.200.000	0
Persediaan	648.500	0
Jumlah Aset Lancar	19.848.500	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 19.200.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.200.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (dalam satuan Rupiah)			
No.	Jenis	30 Juni 2026	TA 2025
1	Kwitansi yang belum dipertanggungjawabkan	7.872.049	19.649.487
2	Uang tunai pada brangkas Bendahara	11.327.951	4.350.513
Jumlah		19.200.000	24.000.000

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2026	TA 2025
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 648.500*

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 648.500 dan Rp.335.310. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2026 dan TA 2025

No.	Uraian	30 Juni 2026	TA 2025
1	Barang Konsumsi	648.500	335.310
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Persediaan lainnya	0	0
Total		648.500	335.310

Semua persediaan pada saat tanggal pelaporan dalam kondisi baik sebagaimana terdapat dalam opname fisik nomor 06/SEKPMW1-Mil04/PL1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026.

Saldo awal	:	0
Pembelian	:	21.215.551
Pemakaian	:	20.567.051
Sisa akhir	:	648.500

C.1.4. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Persediaan yang belum diregister merupakan persediaan yang sudah dibeli dan dicatat di aplikasi persediaan tetapi belum dipertanggungjawabkan pada Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp.
14.520.809.340*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 tersaji sebesar Rp. 14.520.809.340 dan Rp. 14.774.269.652. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	2025	Perubahan
1	Tanah	10.466.081.000	10.466.081.000	0
2	Peralatan dan Mesin	3.904.245.984	3.835.484.274	17.960.000
3	Gedung dan Bangunan	4.650.227.000	4.650.227.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000	0
	Jumlah	19.020.743.984	18.951.982.274	17.960.000
	Akumulasi Penyusutan	(4.707.412.324)	(4.431.172.934)	(271.420.312)
	Nilai Buku Aset Tetap	14.313.331.660	14.520.809.340	(253.460.312)

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
10.466.081.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.466.081.000 dan Rp. 10.466.081.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	2.387 M ²	08	MA RI	Tanah Kosong	6.846.393.000
2.	2	3.250 M ²	36	MA RI	Gedung Kantor	3.619.688.000
Jumlah						10.466.081.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
3.904.245.984*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.904.245.984 dan Rp. 3.835.484.274. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2026	3.904.245.984
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2026	3.904.245.984
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(91.269.189)
Nilai Buku 30 Juni 2026	3.812.976.795

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
4.650.227.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.650.227.000 dan Rp. 4.650.227.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2026	4.650.227.000
Mutasi Tambah	0
Koreksi nilai tim penertiban aset	0
Mutasi Kurang	0
Koreksi semu hasil penilaian kembali	0
Saldo per 30 Juni 2026	4.650.227.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(1.107.675.732)
Nilai Buku 30 Juni 2026	3.542.551.268

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan :
Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0 .

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
190.000*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai

perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 190.000 dan Rp. 190.000.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	190.000
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2026	190.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	190.000

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan :
Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap :
Rp.
(4.707.412.324)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp. (4.707.412.324) dan Rp. (4.569.543.807).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.904.245.984	(3.599.736.592)	304.509.392
2	Gedung dan Bangunan	4.650.227.000	(1.107.675.732)	3.542.551.268
3	Aset Tetap Lainnya	190.000	0	190.000
Jumlah		8.554.662.984	(4.707.412.324)	3.847.250.660

C.2.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp. 0 dan Rp. 75.302.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG berupa lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor telah dihapuskan karena sudah tidak digunakan kembali. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(0)
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

Aset tak berwujud PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG pada tahun 2026 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan dikurangi oleh akumulasi penyusutan tahun berjalan. Aset ini berupa lisensi yang digunakan untuk penyelesaian perkara tingkat banding tetapi saat ini aplikasi ini tidak digunakan lagi dalam penyelesaian perkara sehingga status BMN nya diubah menjadi aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional.

C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp. 0*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp. 0; Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Militer I-05 Palembang.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka
Pendek :
Rp.
775.003.658

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 775.003.658 dan Rp. 1.086.093.657. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Militer I-05 Palembang per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025
Utang Kepada Pihak Ketiga	747.931.609	1.070.962.657
Utang yang belum ditagihkan	7.872.049	0
Pendapatan diterima dimuka	0	15.131.000
Uang Muka dari KPPN	19.200.000	0
Jumlah	775.003.658	1.086.093.657

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang
kepada Pihak
Ketiga:
Rp.
747.931.609

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 747.931.609 dan Rp. 1.070.962.657. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG per tanggal 30 Juni 2026 pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Utang kepada pihak ketiga	747.931.609	Gaji Juli 2026 para pegawai
Jumlah		747.931.609	

C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uang Muka
dari
KPPN:
Rp. 0

Saldo Pendapatan diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 15.131.000. Pendapatan diterima dimuka merupakan uang pendapatan dari sewa tanah Pengadilan Militer I-05 Palembang yang ada di Jl. Soekarno Hatta Palembang selama periode 12 bulan (tahunan).

C.6. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang
Masih Harus
Dibayar:
Rp. 0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2026 dan 2025 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025
	NIHIL	
Jumlah		

C.7. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
13.558.176.502

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.558.176.502 dan Rp. 14.208.961.229. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP :
Rp.6.071.754.*

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang merupakan pendapatan sewa tanah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.6.071.754 dan Rp.117. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	6.071.754	0
	Total Pendapatan	0	6.071.754	0

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp.
6.967.161.158*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.967.161.158 dan Rp. 2.328.335.559. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Pegawai	6.967.161.158	2.328.335.559	4.638.825.599	199,23
Total Beban Pegawai	6.967.161.158	2.328.335.559	4.638.825.599	199,23

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp. 16.814.851*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.814.851 dan Rp. 15.138.238. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,

termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	16.814.851	15.138.238	1.676.613	11,08
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	16.814.851	15.138.238	1.676.613	11,08

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp.
424.655.270*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 424.655.270 dan Rp. 645.185.099. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	288.356.245	553.404.348	(265.048.103)	(47,89)
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	977.200	1.305.000	(327.800)	(31,67)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.050.000	22.120.000	(3.070.000)	(13,88)
Beban Barang Operasional Lainnya	0	2.100.000	(2.100.000)	(100)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstakomptabel	1.440.000	689.113	750.887	108,96
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	280.000	(280.000)	100
Beban Langganan Listrik	55.756.703	0	55.756.703	100
Beban Langganan Telepon	2.503.080	2.476.798	(26.282)	(1,06)
Beban Langganan Air	2.622.042	7.369.840	(4.747.798)	(64,42)
Beban sewa	53.650.000	55.440.000	(1.790.000)	(3,23)
Total Beban Barang Jasa	424.655.270	645.185.099	(220.529.829)	(34,18)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp.237.532.154

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 237.532.154 dan Rp. 227.893.603. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.618.936	163.873.545	5.254.609	3,21
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.161.018	63.716.058	11.444.960	17,96
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	3.752.200	0	3.752.200	100
Total Beban Pemeliharaan	237.532.154	227.839.603	9.692.551	4,25

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 10.644.500

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.644.500 dan Rp 8.887.224. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	10.644.500	8.587.224	(6.658.176)	(77,54)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	300.000	(1.650.000)	(550)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Pengembalian belanja	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	10.644.500	8.887.224	1.757.276	19,77

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial

Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
: Rp.
(137.868.517)*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. (137.868.517) dan Rp. (135.710.153). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	91.269.189	89.110.825	2.110.825	2,42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.599.328	46.599.328	0	0
Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	(137.868.517)	(135.710.153)	2.110.824	2,42

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional :
Rp. 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	%
Pendapatan pelepasan aset non lancar	0	0	0	0
Beban pelepasan aset non lancar	0	0	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.355.132.520 dan Rp. 14.635.561.334.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. (7.773.473.696) dan Rp. (3.351.529.926). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2026**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG oleh KPKNL Palembang.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Software	0
Jumlah	0

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 koreksi ini merupakan koreksi atas beban langganan daya jasa dan speedy. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.976.517.678 dan Rp. 2.924.929.821. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.976.517.678
Transfer keluar	0
Transfer masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	7.976.517.678

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0 terdiri dari:

Nama satker	Transfer keluar	Transfer masuk
Pengadilan Militer I-05 Palembang	0	
Jumlah	0	0

Pengadilan Militer I-05 Palembang tidak menerima transfer masuk dalam bentuk apapun per periode 30 Juni 2026.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
Total Pengesahan		0
Pengesahan Pengembalian Hibah		0
Jumlah		0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2026 disajikan pada lampiran.

E.6.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.558.176.502 dan Rp. 14.208.961.229.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan tahun ini maupun semester lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Telah menggunakan Rekening Virtual BRI pada Cabang A Rivai Palembang A/C 653246632111000 a.n. BPG 014 Dilmil I-05 Palembang yang digunakan sebagai Penampung Kas Bendahara Pengeluaran DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

F.2.3. Revisi DIPA

Untuk periode per 30 Juni 2026 telah dilakukan revisi Dipa sebanyak 7 kali, yaitu revisi Dipa pertama pada tanggal 25 Desember 2025, revisi Dipa kedua pada tanggal 14 Januari 2026, revisi Dipa ketiga pada tanggal 9 Februari 2026, revisi Dipa keempat pada tanggal 13 Februari 2026, revisi Dipa kelima pada tanggal 9 April 2026, revisi Dipa keenam pada tanggal 15 April 2026 dan revisi Dipa ketujuh pada tanggal 17 Juni 2026.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Per tanggal 30 Juni 2026 terdapat satu kali ralat SPM, yaitu pada nomor SPM 00080A tanggal 10 Maret 2026 pada akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Printer) menjadi akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel).

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2026 pada Pengadilan Militer I-05 Palembang dengan rincian sebagaimana terlampir.

DRAFT

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Tingkat Satker (Non BLU)

Periode : Semester I Tahun 2026

Kode Satker : 663211
 Nama Satker : Pengadilan Militer I-05 Palembang
 Nama Eselon 1 : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 Nama Kementerian : Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan.			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA <i>face</i> per 30 Juni 2026	√		Ada
2. Neraca per 30 Juni 2026	√		Ada
3. Laporan Operasional per 30 Juni 2026	√		Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2026	√		Ada
5. Catatan atas laporan Keuangan	√		Ada
Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi	√		Ada
2. Laporan Kuasa Pengguna barang	√		Ada
3. Daftar Rekening Pemerintah	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	√		Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	√		Sama
3. Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
KESESUAIAN MIGRASI SALDO AWAL			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal Aset 2026 = Total Aset Audited 2025	√		Sama
2. Saldo Awal Kewajiban 2026 = Total Kewajiban Audited 2025 - Pendapatan Ditangguhkan + Akun 219671	√		Sama
3. Saldo Awal Ekuitas 2026 = Total Ekuitas Dana Audited 2025 + Pendapatan Ditangguhkan - Akun 219671	√		Sama
NERACA PERCOBAAN			
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak

Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (1xxxxx) bersaldo (D) <i>(kec. Penyisihan dan Akumulasi)</i>	√		Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) <i>(kec. Pengembalian Pendapatan)</i>	√		Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxxx) bersaldo (D) <i>(kecuali Beban Penyisihan Piutang)</i>	√		Ya
8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)		√	Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI</i>		√	Tidak
3. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)		√	Tidak
8. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)		√	Tidak
9. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)		√	Tidak
4. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
5. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
6. Adakah akun 525xxx (Belanja barang BLU)		√	Tidak
7. Adakah akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
8. Adakah akun "yang belum diregister"		√	Tidak
9. Adakah akun-akun lainnya yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs.			Tidak
Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya
Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun			
1. 218211 (Hibah Langsung Yang belum disahkan), dengan nilai maksimal sama, bisa lebih kecil.	√		Ya
2. akun 218211 di kredit	√		Ya
Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 391119 (Koreksi Lainnya)		√	Tidak
<i>Jika ada, uraikan dalam lampiran, Jurnal SAIBA yang dibuat dan penyebabnya.</i>			
2. Adakah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset lainnya)		√	Ada/tidak
<i>Akun ini jarang terjadi, jika ada, pastikan kebenarannya dan pastikan Jurnal kiriman dari Persediaan/SIMAK</i>			
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak

Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif			
9. Kegiatan Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan	√		Positif
- Beban Pegawai	√		Positif
- Beban Persediaan	√		Positif
- Beban Barang dan Jasa	√		Positif
- Beban Pemeliharaan	√		Positif
- Beban Perjalanan Dinas	√		Positif
- Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat	√		Positif
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	√		Positif
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	√		Pos/Neg
10. Kegiatan Non Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	√		Positif
- Beban Pelepasan Aset non Lancar	√		Positif
- Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	√		Positif
- Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	√		Positif
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	√		Positif
- Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif
Pengecekan antar laporan	Ya	Tidak	Seharusnya
11. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat/bansos?		√	Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx/57xxxx?		√	Tidak
Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya hanya dari pembelian Materai, atau pembelian tahun lalu, penyerahan tahun berjalan.			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"	√		Ada
2. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?		√	Tidak
Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK			
Akun-akun pada LPE "terkadang" digunakan untuk pasangan jurnal yang tidak seharusnya (misal: untuk menghilangkan "belum diregister", menyamakan dengan L-BMN, dll), dengan demikian agar dilakukan penelaahan mendalam terhadap jurnal yang melibatkan akun-akun ini.			
NERACA			
Pengecekan Persamaan Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Sama
Pengecekan Akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan" ?		√	Tidak
Pengecekan Keterkaitan Transaksi	Ada	Tidak	Seharusnya
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"			

1. Ada Akun Piutang maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang		√	Ada/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ada/Tidak
2. Ada Piutang jangka Panjang (TP/TGR)			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada/Tidak
3. Ada persediaan maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada/Tidak
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)		√	Ada/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL		√	Ada/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ada/Tidak
Pengecekan Apakah sudah melakukan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan	√		Ada
- Ada pendapatan diterima Dimuka	√		Ada
2. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan		√	Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka		√	Tidak
3. Ada realisasi belanja Jasa Listrik di Neraca Percobaan		√	Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar		√	Tidak
TELAAH KESESUAIAN DENGAN LAP. BMN (APLIKASI PERSEDIAAN & SIMAK)			
Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK) untuk:			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan	√		Sama
2. Aset Tetap	√		Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	√		Sama
4. Aset Lainnya	√		Sama
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	√		Sama
Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK)	√		Sama
2. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK)	√		Sama
Semenjak menggunakan basis Akrua, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum.			
	Sesuai	Belum	Seharusnya
- Aplikasi Persediaan (Menu Laporan - Daftar Transaksi Persediaan)	N/A	N/A	
- Aplikasi SIMAK-BMN (Menu Buku/Daftar - Daftar Transaksi BMN)	N/A	N/A	
Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrua per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN			
Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC		√	Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC		√	Tidak

Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)		√	Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)		√	Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)		√	Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)		√	Tidak
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)		√	Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)		√	Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA (LRA/B)

	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2 Ada uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> "		√	Tidak

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah akun "Hibah yang belum Disahkan" telah dijelaskan?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan SAP/PMK 177/2015 ?	√		Ya
4. Apakah semua akun di LO dan LPE telah dijelaskan?	√		Ya
Pengungkapan Penting Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
5. Untuk KL Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?	√		Ya
6. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing KL	√		Ya
<i>(misalnya: Status Tuntutan Hukum Pihak Ketiga (Incrakht, penganggaran), Barang Bukti, dll)</i>			

Mengetahui



Mayor Chk NRP. 21950303390275

Palembang, 30 Juni 2026

Penelaah,

Srilanjari, A.Md

NIP. 199309082020122012

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (663211) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	19,333,968	9,565,833	9,768,135	102.115
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	19,333,968	9,565,833	9,768,135	102.115
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	19,333,968	9,565,833	9,768,135	102.115
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,967,161,158	2,328,335,559	4,638,825,599	199.234
Beban Persediaan	16,814,851	15,138,238	1,676,613	11.075
Beban Barang dan Jasa	424,655,270	645,185,099	(220,529,829)	(34.181)
Beban Pemeliharaan	237,532,154	227,839,603	9,692,551	4.254
Beban Perjalanan Dinas	10,644,500	8,887,224	1,757,276	19.773
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (663211) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	137,868,517	135,710,153	2,158,364	1.59
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,794,676,450	3,361,095,876	4,433,580,574	131.909
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,775,342,482)	(3,351,530,043)	(4,423,812,439)	131.994
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,868,786	117	1,868,669	1,597,1 52.991
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,868,786	117	1,868,669	1,597,1 52.991
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,868,786	117	1,868,669	1,597,1 52.991
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,773,473,696)	(3,351,529,926)	(4,421,943,770)	131.938
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,773,473,696)	(3,351,529,926)	(4,421,943,770)	131.938

Keterangan :

FINAL

Palembang, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Sughyadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21950303390275

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (663211) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

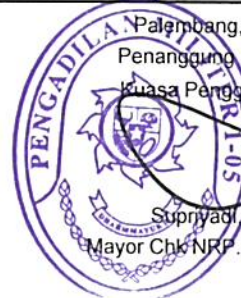
URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13,355,132,520	14,635,561,334	(1,280,428,814)	(8.75)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,773,473,696)	(3,351,529,926)	(4,421,943,770)	131.94
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,976,517,678	2,924,929,821	5,051,587,857	172.71
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	203,043,982	(426,600,105)	629,644,087	(147.6)
EKUITAS AKHIR	13,558,176,502	14,208,961,229	(650,784,727)	(4.58)

Keterangan :

FINAL

Palembang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275



Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM
Halaman : 1
lap_irfa_face_salker_new_poc

URAIAN		2026				2025			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1		2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah		0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		0	6,071,754	6,071,754	0	0	117	(117)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0	6,071,754	6,071,754	0	0	117	(117)	0
III. Pendapatan Hibah		0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		0	6,071,754	6,071,754	0	0	117	(117)	0
B. Belanja Negara		0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintahan Pusat		14,553,257,000	7,982,589,432	(6,570,667,568)	55	5,357,286,000	2,924,929,938	2,432,326,062	55
1. Belanja Pegawai		13,022,367,000	7,276,492,549	(5,745,874,451)	56	3,857,222,000	2,085,394,625	1,771,827,375	54
2. Belanja Barang		1,499,890,000	696,122,883	(803,767,117)	46	1,500,034,000	839,535,313	660,498,687	56
3. Belanja Modal		31,000,000	9,974,000	(21,026,000)	32	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil		0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG 663211

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_salker_new.poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	14,553,257,000	7,982,589,432	(6,570,667,568)	55	5,357,256,000	2,924,929,938	2,432,326,062	55
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Palembang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
Supriyati, S.H., M.H.
Mayor Ckk MRP/21950303390275

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (663211) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	19,200,000	0	19,200,000	0.00
Persediaan	648,500	0	648,500	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	19,848,500	0	19,848,500	
ASET TETAP				
Tanah	10,466,081,000	10,466,081,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,904,245,984	3,894,271,984	9,974,000	0.26
Gedung dan Bangunan	4,650,227,000	4,650,227,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,707,412,324)	(4,569,543,807)	(137,868,517)	3.02
JUMLAH ASET TETAP	14,313,331,660	14,441,226,177	(127,894,517)	(0.89)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	75,302,000	(75,302,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(75,302,000)	75,302,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	14,333,180,160	14,441,226,177	(108,046,017)	(0.75)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	747,931,609	1,070,962,657	(323,031,048)	(30.16)
Utang Yang Belum Ditagihkan	7,872,049	0	7,872,049	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	15,131,000	(15,131,000)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	19,200,000	0	19,200,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	775,003,658	1,086,093,657	(311,089,999)	(28.64)
JUMLAH KEWAJIBAN	775,003,658	1,086,093,657	(311,089,999)	(28.64)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	13,558,176,502	13,355,132,520	203,043,982	1.52
JUMLAH EKUITAS	13,558,176,502	13,355,132,520	203,043,982	1.52
JUMLAH EKUITAS	13,558,176,502	13,355,132,520	203,043,982	1.52
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,333,180,160	14,441,226,177	(108,046,017)	(0.75)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (663211) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (663211) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	19,200,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	648,500	0
0.0	131111	Tanah	10,466,081,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,904,245,984	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,650,227,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	190,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,599,736,592
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,107,675,732
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	747,931,609
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	7,872,049
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	19,200,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,982,589,432
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,071,754	0
0.0	391111	Ekuitas	0	13,355,132,520
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,371,925
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	962,043
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,868,786
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	383,714,180	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	6,686	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	35,811,608	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	11,253,450	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,720,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	21,888,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,328,432	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	27,736,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	40,435,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,995,000	0
3.0	511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	11,340,000	0
3.0	511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	28,980,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,018,060,000	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	4,996,900,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	267,887,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,028	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	19,430,811	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	6,000,538	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	18,521,415	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	36,523,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	16,623,750	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (663211) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	288,356,245	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	977,200	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19,050,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	55,756,703	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,503,080	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,622,042	0
3.0	522141	Beban Sewa	53,650,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158,618,936	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75,161,018	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10,644,500	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	91,269,189	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46,599,328	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	16,814,851	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,752,200	0
JUMLAH			26,841,340,688	26,841,340,688

Keterangan :

FINAL

Ralembang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP/ 21950303390275

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (663211) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,982,589,432
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	6,071,754	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,240,925
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	962,043
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,868,786
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	344,061,880	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6,026	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	32,133,728	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	9,996,420	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	8,640,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	19,330,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,328,432	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	24,767,640	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	50,267,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,715,000	0
3.0	511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	10,080,000	0
3.0	511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	25,760,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	909,298,000	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5,493,700,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	235,416,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,430	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,075,561	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,273,200	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16,276,395	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	44,754,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	14,608,750	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	287,891,076	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	977,200	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	19,050,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17,679,231	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	68,255,450	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,003,696	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,322,336	0
3.0	522141	Belanja Sewa	53,650,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158,618,936	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71,290,458	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (663211) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:35 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,644,500	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,974,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	113
JUMLAH			7,988,661,299	7,988,661,299

Keterangan :

FINAL

Palembang, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Supriyadi, S.H., M.H.

2195030390275

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 663211
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SUMATERA SELATAN
PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/26 3:36 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/7/26 12:51 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	369,383,000	659,036,000	344,061,880	0	344,061,880	52.21	314,974,120
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,000	10,000	6,026	113	5,913	59.13	4,087
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72,439,000	72,439,000	32,133,728	0	32,133,728	44.36	40,305,272
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	19,386,000	19,386,000	9,996,420	0	9,996,420	51.57	9,389,580
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,340,000	29,340,000	8,640,000	0	8,640,000	29.45	20,700,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	35,360,000	35,360,000	19,330,000	0	19,330,000	54.67	16,030,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	26,122,000	26,122,000	3,328,432	0	3,328,432	12.74	22,793,568
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	43,800,000	43,800,000	24,767,640	0	24,767,640	56.55	19,032,360
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	140,000,000	140,000,000	50,267,000	0	50,267,000	35.91	89,733,000
511129	Belanja Tunjangan Umum PNS	26,560,000	26,560,000	11,715,000	0	11,715,000	44.11	14,845,000
511151	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	762,400,000	1,052,053,000	504,246,126	113	504,246,013	47.93	547,806,987
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri							
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	17,640,000	17,640,000	10,080,000	0	10,080,000	57.14	7,560,000
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	45,080,000	45,080,000	25,760,000	0	25,760,000	57.14	19,320,000
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000
5113	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	83,720,000	83,720,000	35,840,000	0	35,840,000	42.81	47,880,000
511324	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	382,634,000	2,080,034,000	909,298,000	0	909,298,000	43.72	1,170,736,000
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,697,310,000	9,706,500,000	5,493,700,000	0	5,493,700,000	56.6	4,212,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	3,079,944,000	11,786,534,000	6,402,998,000	0	6,402,998,000	54.32	5,383,536,000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	10,000	10,000	235,416,200	0	235,416,200	2,354.162	(235,406,200)
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,000	10,000	4,430	0	4,430	44.3	5,570
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,000	10,000	17,075,561	0	17,075,561	170.755,61	(17,065,561)
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	10,000	10,000	5,273,200	0	5,273,200	52.732	(5,263,200)
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,000	10,000	16,276,395	0	16,276,395	162.763,95	(16,266,395)
511628	Belanja Uang Makan PPPK	100,000,000	100,000,000	44,754,000	0	44,754,000	44.75	55,246,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,000	10,000	14,608,750	0	14,608,750	146.087,5	(14,598,750)
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	100,060,000	100,060,000	333,408,536	0	333,408,536	333.21	(233,348,536)
52	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,026,124,000	13,022,367,000	7,276,492,662	113	7,276,492,549	55.88	5,745,874,451
5211	BELANJA BARANG							
	Belanja Barang Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 663211
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SUMATERA SELATAN
PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tangal : 21/07/26 3:36 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_saikun_poc
Tgl Data : 21/7/26 12:51 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO			
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4/7	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	667,147,000	650,871,000	287,891,076	0	287,891,076	44.23	362,979,924	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,000,000	5,000,000	977,200	0	977,200	19.54	4,022,800	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	45,720,000	45,720,000	19,050,000	0	19,050,000	41.67	26,670,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	717,867,000	701,591,000	307,918,276	0	307,918,276	43.89	393,672,724	
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakompiabel	1,800,000	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	100	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,100,000	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000	100	0	
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	41,000,000	41,000,000	17,679,231	0	17,679,231	43.12	23,320,769	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	41,000,000	41,000,000	17,679,231	0	17,679,231	43.12	23,320,769	
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	166,032,000	154,826,000	68,255,450	0	68,255,450	44.09	86,570,550	
522112	Belanja Langganan Telepon	8,400,000	8,400,000	3,003,696	0	3,003,696	35.76	5,396,304	
522113	Belanja Langganan Air	19,200,000	19,200,000	3,322,336	0	3,322,336	17.3	15,877,664	
522141	Belanja Sewa	161,180,000	161,180,000	53,650,000	0	53,650,000	33.29	107,530,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	354,812,000	343,606,000	128,231,482	0	128,231,482	37.32	215,374,518	
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	230,000,000	218,500,000	158,618,936	0	158,618,936	72.59	59,881,064	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146,890,000	139,545,000	71,290,458	0	71,290,458	51.09	68,254,542	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	376,890,000	358,045,000	229,909,394	0	229,909,394	64.21	128,135,606	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,908,000	50,908,000	10,644,500	0	10,644,500	20.91	40,263,500	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	53,908,000	53,908,000	10,644,500	0	10,644,500	19.75	43,263,500	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,546,577,000	1,499,890,000	666,122,883	0	666,122,883	46.41	803,767,117	
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,000,000	31,000,000	9,974,000	0	9,974,000	32.17	21,026,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	31,000,000	31,000,000	9,974,000	0	9,974,000	32.17	21,026,000	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	31,000,000	31,000,000	9,974,000	0	9,974,000	32.17	21,026,000	
	JUMLAH BELANJA	5,603,701,000	14,553,257,000	7,982,589,545	113	7,982,589,432	54.85	6,570,667,568	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LRA.P.E1.1
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Tanggal : 23/07/26 4:21 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 1100	SUMATERA SELATAN	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 663211	PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG	Prg ID : lap_lra_pen_akun_saker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,240,925	0	3,240,925	0
425131	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	3,240,925	0	3,240,925	
4258	Pendapatan Denda					
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	962,043	0	962,043	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	962,043	0	962,043	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,868,786	0	1,868,786	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,868,786	0	1,868,786	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	6,071,754	0	6,071,754	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	6,071,754	0	6,071,754	

**RINCIAN BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026**

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	383,714,180
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-113
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	6,799
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	35,811,608
511122	Beban Tunj. Anak PNS	11,253,450
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,720,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	21,888,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,328,432
511126	Beban Tunj. Beras PNS	27,736,860
511129	Beban Uang Makan PNS	40,435,000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,995,000
511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	11,340,000
511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	28,980,000
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,018,060,000
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	4,996,900,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	267,887,400
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,028
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	19,430,811
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	6,000,538
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	18,521,415
511628	Beban Uang Makan PPPK	36,523,000
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	16,623,750
JUMLAH		6,967,161,158

**RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026**

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158,618,936
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75,161,018
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,752,200
JUMLAH		237,532,154

**RINCIAN BEBAN BARANG OPERASIONAL TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026**

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	288,356,245
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	977,200
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19,050,000
521211	Beban Bahan	300,000
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000
522111	Beban Langganan Listrik	55,756,703
522112	Beban Langganan Telepon	2,503,080
522113	Beban Langganan Air	2,622,042
522141	Beban Sewa	53,650,000
JUMLAH		424,655,270

RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	91,269,189
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46,599,328
JUMLAH		137,868,517

RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
593111	Beban Persediaan konsumsi	16,814,851
JUMLAH		16,814,851

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor :06/SEKPMW1-Mil04/PL1/VI/2026

Nama Satker : Pengadilan Militer I-04 Palembang
Kode Satker : 663211
UAPPB-W : (1100) Sumatera Selatan
UAPPB-EI : (01) Badan Usaha Administrasi
UAPB : 005.01.1100.098938.000.KD

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : M. Nasir, S.H
NIP : 198205132006041004
Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Keuangan
2. Nama : Larasati Rahmaneeyuda Putri, A.Md
NIP : 200003312025062019
Jabatan : Staf Pengelola Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik persediaan Semesteran Tahun 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

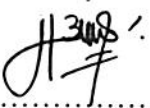
Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

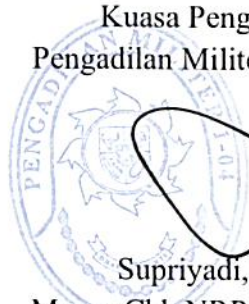
1. M. Nasir S.H.

.....


2. Larasati Rahmaneeyuda Putri, A.Md

.....


Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Militer I-04 Palembang




Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275

HASIL OPNAME FISK

Nama Satker : Pengadilan Militer I-04 Palembang
Kode Satker : 663211
UAPPB-W : (1100) Sumatera Selatan
UAPPB-EI : (01) Badan Usaha Administrasi
UAPB : 005.01.1100.098938.000.KD

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Rupiah
1	Lakban Hitam 2 Inc	3	Pcs	19.500	58.500
2	Isi Staples No.10	5	Kotak	3.000	15.000
3	Kertas Folio F4	5	RIM	61.000	305.000
4	Kertas A4	5	RIM	54.000	270.000
Jumlah					648.500

Tim Pelaksana Opname Fisik:

1. M. Nasir S.H.

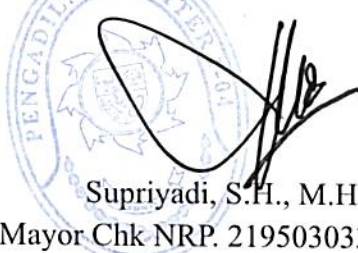

.....

2. Larasati Rahmaneeyuda Putri, A.Md


.....

- Barang Persediaan dengan kondisi rusak sebanyak Nihil
- Barang Persediaan dengan kondisi usang sebanyak Nihil

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Militer I-04 Palembang


Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275

LAPORAN KINERJA 2026

Periode Juni 2026

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 00501 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SATUAN KERJA 663211 PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tanggal 27-07-2026
Hal 1 dari 1

Uraian		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
WA	Program Dukungan Manajemen	14,553,257,000	7,982,589,545	54.8 %	—	—	—	—
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	31,000,000	9,974,000	32.2 %	—	—	—	—
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	31,000,000	9,974,000	32.2 %	—	—	—	—
951	Layanan Sarana Internal	31,000,000	9,974,000	32.2 %	5	2	40 %	Unit
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	14,522,257,000	7,972,615,545	100 %	—	—	—	—
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14,521,957,000	7,972,315,545	54.9 %	—	—	—	—
962	Layanan Umum	1,440,000	1,440,000	100 %	1	1	100 %	Layanan
994	Layanan Perkantoran	14,520,517,000	7,970,875,545	54.9 %	2	0	0 %	Layanan
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	300,000	100 %	—	—	—	—
Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	300,000	100 %	1	1	100 %	Dokumen